

## ANALISIS WACANA KRITIS POLITIK IDENTITAS DALAM TALKSHOW KOMPAS TV

Winona Callista Hephzhibah Simon<sup>1</sup>, Farid Pribadi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya  
[winonacallista.20049@mhs.unesa.ac.id](mailto:winonacallista.20049@mhs.unesa.ac.id)

### **Abstract**

*This study aims to critically analyze the discourse of identity politics through an episode from a controversial talk show. The primary focus of the research is to identify core narratives, language choices, and rhetorical strategies employed by participants, with the goal of providing a deeper understanding of the complexities and nuances involved in the discourse of identity politics within contemporary Indonesian society. Through this investigation, various perspectives are uncovered, ranging from outright rejection to cautious acceptance of identity politics. Key participants, including political figures, academics, and activists, actively express their views, often engaging in heated debates and offering diverse perspectives. The discourse reflects widespread societal tensions and ideological divisions, with some speakers condemning identity politics as divisive and dangerous, while others defend it as a legitimate aspect of Indonesian national diversity. The analysis in this study documents various discourse strategies used by speakers, including argument structuring, emotional language use, and references to history and culture. Furthermore, the research highlights the role of media in shaping and disseminating discourse on identity politics, particularly through the influence of talk shows as platforms for public debate and opinion formation. The findings of this research affirm the complexity of identity politics in Indonesia and underscore its intersectionality with religion, ethnicity, and socio-political dynamics. Thus, the study makes a significant contribution to a deeper understanding of the construction of identity politics discourse within the Indonesian media context, while also providing insights into the challenges and opportunities for fostering dialogue and reconciliation in a diverse and polarized society.*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis wacana politik identitas melalui satu episode dari acara *talk show* yang memicu kontroversi. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi narasi inti, pemilihan bahasa, dan strategi retorik yang digunakan oleh para peserta, dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas dan nuansa yang terlibat dalam wacana politik identitas di masyarakat Indonesia saat ini. Melalui penelitian ini, berbagai pandangan ditemukan, mulai dari penolakan yang tegas hingga penerimaan yang hati-hati terhadap politik identitas. Peserta kunci, termasuk tokoh politik, akademisi, dan aktivis, secara aktif mengemukakan pendapat mereka, sering kali terlibat dalam debat sengit, dan menawarkan perspektif yang beragam. Wacana ini merefleksikan ketegangan yang meluas dalam masyarakat serta perpecahan ideologis, dengan beberapa pembicara mengemukakan politik identitas sebagai sesuatu yang divisif dan berbahaya, sementara yang lain mempertahankannya sebagai bagian sah dari keragaman nasional Indonesia. Analisis dalam penelitian ini mencatat berbagai strategi wacana yang digunakan oleh para pembicara, termasuk penyusunan argumen, penggunaan bahasa yang berisi emosi, dan referensi sejarah dan budaya. Selain itu, penelitian ini menyoroti peran media dalam membentuk dan menyebarkan wacana politik identitas, khususnya melalui pengaruh acara *talk show* sebagai platform untuk debat publik dan pembentukan opini. Temuan penelitian ini menegaskan kompleksitas politik identitas di Indonesia, serta menyoroti interseksionalitasnya dengan agama, etnisitas, dan dinamika sosial-politik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman yang lebih mendalam tentang konstruksi wacana politik identitas dalam konteks media Indonesia, sekaligus menyediakan wawasan tentang tantangan dan peluang untuk membangun dialog dan rekonsiliasi dalam masyarakat yang beragam dan terpolarisasi.

**Kata Kunci:** Analisis Wacana Kritis, Politik Identitas, Pengaruh Media

## 1. Pendahuluan

Pencapaian momentum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menarik perhatian dari berbagai segmen masyarakat, termasuk masyarakat umum, calon presiden, pengamat politik, dan media massa. Pers, sebagai salah satu pilar utama demokrasi, memegang peran krusial dalam mengawasi serta mengarahkan arus kebijakan pemerintahan (Dewan Pers, 2016; Barnhurst, 2004). Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 menjelaskan "pers" sebagai lembaga sosial dan media komunikasi massa yang terlibat dalam kegiatan jurnalistik, termasuk mencari, mendapatkan, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dalam berbagai format seperti tulisan, suara, gambar, serta melalui platform media elektronik dan saluran lainnya.

Media massa, dalam cakupan yang luas, mencakup segala jenis publikasi, siaran radio, siaran televisi, dan media lainnya (Chang, 2017). Dari definisi yang tertera dalam Undang-Undang tersebut, dapat dipahami bahwa media massa di Indonesia dianggap sebagai bagian dari lembaga masyarakat atau lembaga sosial, bukan sebagai lembaga pemerintah atau swasta. Sebagai hasilnya, media massa tidak boleh dimanfaatkan oleh pemerintah, kelompok, golongan, atau partai politik untuk kepentingan tertentu (Surbakti, 2016).

Wacana dapat dimanfaatkan untuk beragam tujuan oleh penutur dan lawan tutur, di mana fleksibilitas wacana memungkinkan penyampaian berbagai opini, pendapat, dan ideologi (Dunsmore, 2014). Wacana merupakan sebuah tindakan (action), sehingga pemahaman terhadap hal ini membentuk sebuah wacana sebagai interaksi. Wacana juga memiliki sifat transaksional (monolog) dan interaksional (dialog). Dalam setiap wacana, terdapat asumsi tentang penyapa (addressor), yang merupakan pembicara/penulis, dan pesapa (addressee), yang merupakan pendengar/pembaca. (Sudaryat, 2006). Selain itu, ada dua konsekuensi yang perlu diperhatikan dalam pandangan terhadap wacana. Wacana memiliki tujuan untuk membujuk, mendebat, mempengaruhi, menyangga, bereaksi, mengarahkan opini, dan lain sebagainya. Kedua, wacana merupakan sesuatu yang diekspresikan secara sadar dan terkontrol, bukan diluar kendali atau diekspresikan tanpa kesadaran (Eriyanto, 2001; Idevall, 2019).

Dalam Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis/ CDA*), wacana tidak hanya dilihat sebagai studi kebahasaan semata seperti dalam pemahaman linguistik tradisional, melainkan bahasa dianalisis dalam konteks sosialnya (Geçer, 2018; Rogers, 2008). Pendekatan Analisis Wacana Kritis oleh Fairclough dan Wodak menekankan bahwa bahasa, baik dalam bentuk tuturan maupun tulisan, digunakan sebagai bentuk praktik sosial (Eriyanto, 2001; Na'imah, 2023). Model Analisis Wacana Kritis oleh Teun A. Van Dijk dikenal sebagai "kognisi sosial". Van Dijk menjelaskan bahwa analisis terhadap wacana tidak hanya terfokus pada analisis teks semata, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana teks tersebut diproduksi, termasuk struktur teks, kognisi sosial, dan konteks sosial yang menjadi bagian penting dalam kerangka kerja Van Dijk (Umam, 2009).

Identitas merupakan hasil dari interaksi sosial yang terjadi pada individu, yang kemudian diperkuat, dimodifikasi, bahkan diubah melalui proses-proses sosial (Khamdan, 2022). Ada perbedaan yang signifikan terkait dengan konsep politik identitas dan identitas politik yang perlu dipahami. Awal mula politik identitas berasal sebagai respons terhadap marginalisasi masyarakat akibat kapitalisme arus besar (Ma'arif, 2012). Kauffman adalah tokoh yang menggali esensi politik identitas dengan mempelajari awal munculnya gerakan mahasiswa anti kekerasan, yang dikenal sebagai SNCC (*the Student Nonviolent Coordinating Committee*), yang aktif pada awal tahun 1960-an di Amerika Serikat. Konsep separatisme, sebagai bentuk ekstrem dari politik identitas, mencuat dalam konteks masyarakat Amerika kulit hitam, serta kelompok- kelompok

yang berbahasa selain Inggris dan etnis-etnis lain yang terpinggirkan oleh sistem kapitalisme yang lebih menguntungkan golongan kulit putih.

Agnes Heller, dalam pandangannya, membedakan politik identitas dari bidang lain dengan menekankan pada tingkat di mana sebuah gerakan politik fokus pada perbedaan sebagai kategori utama (Heller, 2005). Ma'arif dalam bukunya yang berjudul "Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Indonesia" menjelaskan bahwa politik identitas seringkali terkait dengan kepentingan lokal yang berbasis pada wilayah, suku, ras, agama, dan ideologi masing-masing (Ma'arif, 2012: 55). Namun, dalam praktiknya, politik identitas sering dimanfaatkan oleh elit politik sebagai strategi untuk memenangkan kontestasi pemilu. Kampanye politik identitas bertujuan untuk memobilisasi massa dengan memanfaatkan sentimen dari ragam perbedaan identitas seperti suku, agama, dan ras (Susanti, 2020). Meskipun seharusnya dukungan masyarakat difokuskan pada visi-misi dan program yang diusung oleh pasangan calon untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi rakyat, namun politik identitas kerap menjadi alat mobilisasi suara melalui eksploitasi perbedaan identitas tersebut.

Identitas, terutama dalam konteks Indonesia dengan keberagaman agama, ras, suku, dan budaya, menjadi sangat penting. Politik identitas, atau politik perbedaan, merupakan bentuk politik yang menggunakan identitas sebagai sumber dan alat politik. Identitas politik tidak dapat dipisahkan dari kesadaran kolektif individu, yang menghasilkan rasa kebersamaan sekaligus perbedaan. Namun, politik identitas adalah politisasi identitas yang membagi masyarakat menjadi dua kubu dengan pandangan yang berseberangan (Miller, 2021).

## 2. Kajian Pustaka

### Analisis Wacana Kritis

Wacana atau *discourse* adalah kesatuan bahasa yang terdiri dari kalimat-kalimat yang saling terkait dan disusun secara koheren, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan (Eriyanto, 2001). Menurut Mohammad A.S Hikam dalam buku Eriyanto (2001:5), wacana berfungsi untuk mengungkapkan maksud tersembunyi atau konteks dari kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh komunikator saat membuat pernyataan. Dalam bentuk komunikasi verbal, wacana merupakan dialog antara penutur dan lawan tutur untuk menyampaikan informasi (Hermawida, 2020).

Wacana dapat digunakan untuk berbagai tujuan oleh penutur dan lawan tutur, dan memiliki fleksibilitas untuk menyampaikan berbagai bentuk pendapat, opini, dan ideologi. Wacana merupakan tindakan (*action*), sehingga pemahaman ini menciptakan wacana melalui interaksi. Wacana juga memiliki sifat transaksional (*monolog*) dan interaksional (*dialog*). Dalam wacana, diasumsikan terdapat penyapa (*addressor*), yaitu pembicara/penulis, dan pesapa (*addressee*), yaitu pendengar/pembaca (Sudaryat, 2006). Selain itu, ada dua konsekuensi dalam pandangan terhadap wacana. Pertama, wacana bertujuan untuk membujuk, mendebat, mempengaruhi, menyangga, bereaksi, dan mengarahkan opini. Kedua, wacana merupakan sesuatu yang diekspresikan secara sadar dan terkontrol, bukan diluar kendali atau diekspresikan secara tidak sadar (Eriyanto, 2001).

Dalam Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*), wacana tidak hanya dipahami sebagai studi kebahasaan semata seperti dalam pengertian ilmu linguistik tradisional, tetapi bahasa dianalisis dalam konteksnya. Analisis Wacana Kritis, menurut Fairclough dan Wodak, menganggap bahwa bahasa dalam tuturan atau tulisan digunakan sebagai bentuk praktik sosial (Eriyanto, 2001). Model Analisis Wacana Kritis oleh Teun A. Van Dijk disebut sebagai "kognisi sosial". Van Dijk menyatakan bahwa analisis wacana tidak hanya dilakukan pada analisis teks semata, melainkan juga harus memperhatikan bagaimana teks tersebut diproduksi, termasuk

struktur teks, kognisi sosial, dan konteks sosial yang merupakan bagian integral dalam kerangka Van Dijk (Umam, 2009).

### 3. Metode Penelitian

Metode yang relevan untuk menganalisis penelitian ini adalah metode kualitatif sehingga dapat mengumpulkan gambaran secara lengkap dan menyeluruh terkait diskursus politik identitas. Penelitian kualitatif memiliki data yang hasilnya menekankan pada pemaknaan terkait substansi penelitian serta bersifat induktif (Moeleong, 2018). Penelitian ini dilakukan secara online melalui media YouTube dari channel Kompas TV pada acara Talkshow Dua Arah. Subjek penelitian ini adalah talkshow Dua Arah Kompas TV, dengan unit analisis berupa individu, benda, atau organisasi yang menjadi sumber informasi dalam dua tayangan Kompas TV yang diunggah, yaitu unggahan pada 24 Maret 2023 dengan judul "Politik Identitas, Jadi Jalan Pintas" yang disiarkan di televisi dan dapat diakses melalui tautan berikut: <https://www.youtube.com/live/tFfRSvhCJWM?si=xxyoSgA5QXaTIfQ>.

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode observasi nonpartisipasi dengan teknik dokumentasi. Peneliti memilih metode observasi nonpartisipasi karena peran peneliti hanya sebagai pengamat yang tidak terlibat secara langsung dalam proses program acara yang diamati. Metode observasi ini digunakan untuk mengamati dengan seksama jalannya tayangan program Dua Arah di stasiun Metro TV, dengan tujuan untuk mendapatkan data berupa wacana-wacana yang muncul selama siaran berlangsung. Observasi nonpartisipasi merupakan metode di mana peneliti hanya melakukan pengamatan dari luar tanpa terlibat secara aktif dalam situasi yang diamati. Dalam konteks ini, peneliti bertindak sebagai pengamat yang mencatat dan mendokumentasikan berbagai aspek dari program Dua Arah, seperti topik pembahasan, pendekatan yang digunakan oleh narasumber, dan reaksi dari audiens. Teknik dokumentasi digunakan untuk merekam data-data yang relevan dari program tersebut, seperti transkripsi percakapan, catatan tentang gaya penyampaian, dan interaksi antara narasumber dan host. (Vraga, 2012).

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### a. Profil Singkat Talkshow “Dua Arah” KompasTV

Talkshow ‘Dua Arah’ KompasTV adalah program televisi yang membahas isu-isu terkini dari perspektif dua sudut pandang yang berbeda. Program ini pertama kali ditayangkan pada tanggal 25 April 2016, dan hingga saat ini telah menghadirkan 604 episode. Dua Arah rutin ditayangkan setiap hari Jumat pukul 20.30 WIB dengan durasi 60 menit, dan dipandu oleh Liviana Cherlisa. Setiap episode program ini mengangkat berbagai tema, termasuk isu-isu terkini seputar kebijakan publik, politik, hukum, sosial, tokoh-tokoh yang sedang dibicarakan, serta tema-tema yang memberi inspirasi.

Salah satu media yang independen dari kepentingan politik adalah Kompas TV. Secara umum, Kompas TV adalah saluran berita yang dimiliki oleh Jakoeb Oetama dan tidak terikat pada kelompok atau partai politik tertentu, sehingga dianggap sebagai sumber berita dan informasi yang dapat dipercaya. Penelitian yang dilakukan oleh Yuanita Nur Widiyanti pada tahun 2018 menunjukkan bahwa Kompas TV mendukung pemerintahan namun tidak memberikan dukungan khusus kepada calon atau partai politik tertentu menjelang Pemilihan Presiden 2019. Produksi suatu program televisi juga tidak hanya bergantung pada jurnalis yang menjadi moderator di layar, namun juga melibatkan tim

yang terlibat aktif dalam merancang tema, judul, materi diskusi, pemilihan narasumber, dan tata grafik tayangan (Tommy Suprpto, 2013).

#### **4.2. Temuan Teks pada video YouTube “Politik Identitas, Jadi Jalan Pintas”**

Pada segmen pertama dalam dialog tersebut, Liviana Cherlisa memulai dengan menjelaskan kontroversi yang timbul akibat pernyataan Anies Baswedan mengenai politik identitas yang menjadi topik perdebatan yang intens. Pernyataan Anies ini menciptakan polemik karena politik identitas menjadi sorotan utama, terutama setelah kunjungannya ke tempat ibadah yang dituduh sebagai bentuk kampanye oleh Bawaslu.

Dialog berlanjut dengan diskusi antara beberapa politisi dan narasumber, yang memberikan perspektif beragam mengenai politik identitas. Andreas Hugo dari PDI Perjuangan mengungkapkan keprihatinannya bahwa politik identitas dapat membahayakan karena mengesampingkan semangat persatuan dalam politik. Namun, sudut pandang yang berbeda diungkapkan oleh Muhammad Iqbal dari PKS, yang melihat penjonjolan identitas dalam politik sebagai sesuatu yang wajar. Kemudian, narasumber membicarakan bagaimana politik identitas seringkali menjadi strategi yang mudah dan murah untuk memperoleh dukungan suara, meskipun berpotensi memecah belah masyarakat. Masinton Pasaribu menekankan pentingnya mengarahkan politik ke arah gagasan daripada hanya memanfaatkan identitas untuk meraih kemenangan.

Andi Sinulingga membahas bahwa aspek identitas seperti agama, suku, dan gender tidak bisa dihindari dalam politik, namun penting untuk memusatkan perhatian pada gagasan-gagasan yang disajikan oleh kandidat, bukan sekadar pada politik identitas itu sendiri. Hermawan Taslim dari Nasdem mengutarakan bahwa identitas tetap relevan namun dapat ditekan dengan mengedukasi masyarakat tentang politik kebangsaan yang menekankan pada identitas kebangsaan di atas yang lain. Titi Anggraini dari PERLUDEM menyoroti bahwa politisasi identitas dapat menjadi isu sensitif jika digunakan secara eksklusif demi kepentingan politik, merujuk pada pengalaman negatif dalam pilkada 2017 dan pilpres 2019 yang memicu polarisasi dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, dialog ini mencerminkan kompleksitas politik identitas dan perbedaan pendapat tentang apakah politik identitas seharusnya menjadi bagian dari konteks politik. Dalam segmen kedua, Titi Anggraini pertama-tama menggambarkan awal politik identitas di Indonesia yang terkait dengan partai politik sebagai representasi dari berbagai kelompok etnis, suku, budaya, dan agama. Namun, seiring berjalannya waktu, politik identitas ini berubah menjadi politisasi identitas yang sering kali dipenuhi oleh hegemoni, kebencian, dan disinformasi. Situasi ini sering kali menciptakan persepsi negatif terhadap hasil pemilu, di mana kemenangan kelompok identitas tertentu dianggap sebagai hasil dari kecurangan.

Percakapan dilanjutkan dengan Hermawi dari Nasdem yang menegaskan pentingnya memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk memperkuat politik kebangsaan di atas politik identitas. Nasdem berkomitmen untuk membangun solidaritas antar-berbagai kelompok tanpa mempermasalahkan identitas tertentu. Kemudian, Dedek Prayudi menyatakan keraguan terhadap penggunaan politik identitas oleh Anies Baswedan, terutama terkait kegiatan di Masjid Al Akbar Surabaya yang diduga sebagai bentuk sosialisasi politik. Hermawi membela kegiatan tersebut sebagai sekadar sholat yang diikuti

oleh masyarakat secara spontan, sementara tanggung jawab atas kegiatan politik menjadi urusan Nasdem.

Masinton Pasaribu kemudian menyoroti adanya trauma yang masih ada dari pilkada 2017 dan menekankan bahwa identitas seharusnya tidak dijadikan bahan pertentangan atau dimanfaatkan dalam konteks politik. Semua pihak menyetujui bahwa politik identitas perlu ditekan, dan pendekatan politik kebangsaan yang inklusif harus menjadi prioritas.

Dialog tersebut mengangkat kompleksitas politik identitas di Indonesia dan upaya untuk membangun politik yang lebih berbasis pada gagasan-gagasan dan solidaritas nasional. Kemudian segmen ketiga, Joko Widodo mengungkapkan keprihatinannya terkait stabilitas politik dan keamanan menjelang pemilu 2024, serta mengajak masyarakat untuk menjaga kondisi yang kondusif dan tidak terjebak dalam politik identitas. Andi Sinulingga menanggapi dakwaan politisasi identitas terhadap pemilih Anies Baswedan dengan menegaskan pentingnya menggunakan data dan riset sebagai dasar pembahasan. Referensi diberikan pada hasil survei yang menunjukkan bahwa pemilih Anies dan Ganjar tidak terpolarisasi secara agama, serta evaluasi kepuasan masyarakat terhadap kinerja Anies Baswedan selama masa kepemimpinannya di DKI Jakarta. Dedek Prayudi juga menyampaikan kekhawatirannya terkait politisasi agama yang terjadi pada pilkada 2017 dan menggarisbawahi fakta-fakta yang menunjukkan adanya polarisasi agama. Meskipun Anies Baswedan mungkin tidak secara langsung terlibat dalam politik identitas, namun orang-orang yang terlibat dalam politisasi agama memiliki hubungan dekat dengan Anies.

Hermawi Taslim menekankan bahwa fokus seharusnya pada fakta dan prestasi yang telah diraih oleh seorang pemimpin, bukan pada opini publik yang dipengaruhi oleh persepsi yang terdistorsi. Dia menyoroti bahwa selama 5 tahun kepemimpinan Anies, tidak ada tindakan diskriminatif terhadap kelompok minoritas. Masinton Pasaribu juga menekankan pentingnya menghindari politisasi identitas dalam kampanye pemilu, menegaskan bahwa pemilu seharusnya menjadi ajang untuk berkompetisi atas gagasan dan ide, bukan untuk mempertentangkan perbedaan identitas.

Liviana Cherlisa menyampaikan pertanyaan mengenai metode pengawasan yang optimal untuk mencegah politisasi identitas dalam pemilu mendatang, yang akan dibahas dalam segmen berikutnya. Keseluruhan percakapan menggambarkan kompleksitas politik identitas dan upaya untuk mencegahnya dalam konteks pemilu 2024, dengan menekankan pentingnya menggunakan data dan fakta sebagai dasar diskusi, serta fokus pada prestasi dan gagasan dalam kampanye politik. Segmen terakhir yaitu keempat, dalam diskusi terakhir mengenai politik identitas dan pesta demokrasi 2024, para narasumber menyatakan komitmen untuk mencegah politisasi identitas dalam konteks pemilihan umum yang akan datang.

Masinton Pasaribu dari PDIP menegaskan bahwa keberagaman merupakan anugerah bagi bangsa Indonesia yang harus dijaga. PDIP menganggap penting untuk memprioritaskan persatuan dan konsep kebhinekaan dalam politik, serta tidak mengesampingkan kepentingan nasional demi politik kekuasaan. Andi Sinulingga menekankan urgensi fokus pada gagasan dan tantangan ke depan, daripada terus memperdebatkan masa lalu yang tidak memberikan manfaat.

Dedek Prayudi menyoroti prinsip meritokrasi dalam demokrasi yang berkualitas, di mana pemimpin dipilih berdasarkan gagasan dan rekam jeaknya, bukan karena identitasnya. Politisasi identitas hanya akan menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas atau memecah masyarakat. Hermawi Taslim dari Nasdem menekankan pentingnya menjaga politik kebangsaan dan menempatkan kepentingan nasional di atas politik identitas. Dia menyoroti bahwa pemilihan umum harus menjadi agenda yang memperjuangkan kepentingan rakyat, di mana politik identitas harus perlahan dihilangkan untuk menekankan kebersamaan nasional.

Titi Anggraini menyoroti perlunya regulasi yang mengatur kampanye agar berfokus pada visi misi program yang edukatif dan pendidikan politik, serta melarang penghinaan terhadap identitas lain. Dia menekankan pentingnya fokus pada gagasan dan rekam jejak kandidat sebagai aspek krusial dalam pemilihan umum. Liviana Cherlisa menutup diskusi dengan menegaskan bahwa pemilu seharusnya menjadi panggung adu ide dan gagasan, bukan saling menyerang karena perbedaan pilihan.

### 4.3. Analisis Teks Talkshow Dua Arah “Politik Identitas, Jadi Jalan Pintas”

#### Analisis Struktur Makro

Talkshow ‘Dua Arah’ KompasTV adalah program televisi yang membahas isu-isu terkini dari perspektif dua sudut pandang yang berbeda. Program ini pertama kali ditayangkan pada tanggal 25 April 2016, dan hingga saat ini telah menghadirkan 604 episode. Dua Arah rutin ditayangkan setiap hari Jumat pukul 20.30 WIB dengan durasi 60 menit, dan dipandu oleh Liviana Cherlisa. Setiap episode program ini mengangkat berbagai tema, termasuk isu-isu terkini seputar kebijakan publik, politik, hukum, sosial, tokoh-tokoh yang sedang dibicarakan, serta tema-tema yang memberi inspirasi.

Secara umum, Kompas TV adalah saluran berita yang dimiliki oleh Jakoeb Oetama dan tidak terikat pada kelompok atau partai politik tertentu, sehingga dianggap sebagai sumber berita dan informasi yang dapat dipercaya. Penelitian yang dilakukan oleh Yuanita Nur Widiyanti pada tahun 2018 menunjukkan bahwa Kompas TV mendukung pemerintahan namun tidak memberikan dukungan khusus kepada calon atau partai politik tertentu menjelang Pemilihan Presiden 2019. Produksi suatu program televisi juga tidak hanya bergantung pada jurnalis yang menjadi moderator di layar, namun juga melibatkan tim yang terlibat aktif dalam merancang tema, judul, materi diskusi, pemilihan narasumber, dan tata grafik tayangan (Tommy Suprpto, 2013).

#### Analisis Superstruktur

Tabel 1 Analisis Superstruktur Berita

Berita Struktur	Kutipan Struktur Berita
Pembuka (Kepala Berita)	Acara dimulai dengan pembukaan oleh Liviana Cherlisa, pembawa acara Dua Arah, yang menguraikan latar belakang masalah yang akan dibahas. Cuplikan pernyataan Ridho Rahmadi tentang deklarasi partai Ummat terkait politik identitas kemudian ditampilkan oleh narator. Dalam cuplikan tersebut, terdapat pendapat dari berbagai tokoh politik mengenai politik identitas dari episode Dua Arah yang berjudul "Was-was Politik Identitas, Bola Panas yang

	digaungkan oleh Partai Ummat," seperti pendapat Andreas Hugo Parera, politisi dari PDI Perjuangan, dan Muhammad Iqbal, Juru Bicara PKS.
Isi (Badan Berita)	Moderator kemudian memulai diskusi dengan mengajukan pertanyaan tentang makna pernyataan Pak Anies kepada Juru Bicaranya, Andi Sinulingga. Setelah Pak Andi memberikan pernyataannya, Masarinton memberikan tanggapannya. Pertanyaan selanjutnya dialamatkan kepada Dedek Prayudi, yang kemudian dijawab oleh Andi Sinulingga, dan akhirnya host menanyakan pendapat Hermawan Taslim mengenai sikap Nasdem. Saat diskusi mulai memanas, Liviana mengajukan pertanyaan kepada panelis, Titi Anggraini. Situasi ini menunjukkan bahwa pendapat disusun dengan mempertanyakan atau mengklarifikasi apa yang dimaksud oleh Anies Baswedan kepada Juru Bicaranya, Andi Sinulingga.
Penutup (Berakhir dari Berita)	Tanggapan dari Masinton, seorang kader PDI Perjuangan, yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pernyataan Juru Bicara Anies Baswedan, juga disoroti. Menyusul ketidaksetujuan dari Masinton, host menanyakan sikap Partai Nasdem kepada Hermawan Taslim, lalu Liviana menanyakan pendapat Dedek Prayudi yang juga mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap 'normalisasi' politik identitas. Pendapat ini diorganisir dengan memperhatikan sudut pandang dari kedua belah pihak, sehingga terjadi saling berbalas pendapat

### Analisis Struktur Mikro

Tabel 2 Analisis Struktur Mikro dalam Berita

Struktur Mikro	Bagian	Penjelasan
Semantik	Latar Belakang	Setelah pengumuman Ridho Rahmadi tentang penggunaan politik Identitas oleh partai Ummat, episode Dua Arah pada tanggal 1 Maret 2023 menjadi sengit karena Anies Baswedan disebut sebagai pelopor politik identitas. Namun, Anies Baswedan justru menegaskan bahwa politik identitas adalah hal yang tak dapat dihindari. Akibatnya, ia mendapat peringatan dari Bawaslu karena dianggap melakukan kampanye di tempat ibadah.
Sintaksis	Bentuk Kalimat	Bentuk kalimatnya berupa campuran antara kalimat aktif dan kalimat pasif.
	Koherensi	Sebagian pendapat dinyatakan dengan menggunakan kalimat induktif dan sebagian lagi menggunakan deduktif.
	Kata Ganti	Kata ganti yang kerap digunakan adalah "kami", "mereka", "dan "kita" untuk menyatakan bahwa mereka mewakili partai

		masing- masing.
<b>Stilistik</b>	<b>Kamus</b>	Pilihan kata yang dipakai adalah pilihan kata yang biasa digunakan dalam perguruan tinggi (akademisi), seperti merujuk pada penggunaan data dan hasil survey untuk mengambil
<b>Retorika</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Penekanan: Dedek Prayudi menggunakan penekanan saat mengucapkan 'Katanya' dengan nada sarkastik.</li> <li>b) Ekspresi: Ekspresi jelas terlihat karena tampilan grafis yang mendukung.</li> <li>c) Grafis: Grafis menunjukkan perbandingan antara tim kontra dan tim pro yang berdebat, serta berbagai pendapat dari tokoh politik yang tidak hadir dalam forum tersebut.</li> </ul>

## 5. Kesimpulan

Talkshow yang telah dianalisis menampilkan suasana yang dinamis dan informatif. Suasana terasa hangat dengan adanya dialog antara narasumber yang memiliki pandangan politik yang beragam. Pembawa acara berhasil menjaga keseimbangan antara pendapat pro dan kontra, menciptakan atmosfer yang memungkinkan untuk debat yang produktif. Narasumber yang diundang juga terlihat berpengalaman dan mampu menyampaikan argumen mereka dengan jelas dan meyakinkan.

Hasil analisis juga menggambarkan bagaimana bahasa digunakan sebagai alat untuk merumuskan dan memperkuat identitas politik serta memengaruhi dinamika kekuasaan politik. Dalam konteks teori bahasa dan kekuasaan yang diperkenalkan oleh Benedict Anderson, talkshow tersebut menjadi representasi dari bagaimana bahasa dapat menjadi alat untuk merumuskan dan memperkuat kekuasaan politik, serta bagaimana identitas politik dapat membentuk dinamika kekuasaan dalam masyarakat. Identitas dalam talkshow tersebut mencerminkan dinamika ruang publik yang kompleks.

Diskusi yang terjadi mencerminkan upaya untuk membentuk opini publik dan memengaruhi agenda politik melalui dialog antara berbagai pihak. Namun, terdapat tantangan dalam mencapai idealitas public sphere yang demokratis, terutama terkait dengan polarisasi opini, dominasi kepentingan tertentu, dan kurangnya ruang untuk partisipasi yang merata. Kesimpulannya, meskipun talkshow tersebut menjadi platform untuk pembicaraan terbuka, masih ada ruang untuk meningkatkan inklusi, pluralitas, dan pertukaran ide yang lebih merata dalam mencapai *public sphere* yang ideal.

## 6. Daftar Pustaka

- [1] Barnhurst, K. G. (2004). Democracy and the News. In *Contemporary Sociology: A Journal of Reviews* (Vol. 33, Issue 3). <https://doi.org/10.1177/009430610403300354>
- [2] Chang, W. C. (2017). Media Use, Democratic Values, and Political Participation: Empirical Evidence from Taiwan. *Japanese Journal of Political Science*, 18(3), 385–406. <https://doi.org/10.1017/S1468109917000081>
- [3] Chapter 10. (2005). *North-Holland Mathematics Studies*, 198(C), 431–506. [https://doi.org/10.1016/S0304-0208\(05\)80044-1](https://doi.org/10.1016/S0304-0208(05)80044-1)

- [5] Geçer, E. (2018). Media , Politics and Democracy : A Critical Perspective Medya , Siyaset ve Demokrasi : Eleştirel Bir Perspektif. *Erciyes İletişim Dergis*, 5(4), 479–492.
- [6] <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/1649206/Nasdem.Siap.Tampung.Kader>.
- [8] <https://willyaditya.com/politik-identitas-bentuk-paling-primitif-bodoh-dan-malas/>
- [11] <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220209132244-32->
- [12] [https://youtu.be/\\_gPQFIJQX7o?si=etXKAJbg3LUFdnO6](https://youtu.be/_gPQFIJQX7o?si=etXKAJbg3LUFdnO6)
- [13] <https://www.youtube.com/live/tFfRSvhCJWM?si=xxyIoSgA5QXaTIfQ>
- [14] Indonesian college students. *Simulacra*, 5(1), 57–68. <https://doi.org/10.21107/sml.v5i1.1396>
- [15] Javnost/The Public , 5(3),. (1998). 5(3), 21–34.
- [16] Nikolova, E. (2021). “The balance of power is me: 0, Harvey Weinstein: 10”: A Critical Discourse Analysis of the press representation of Hollywoods biggest sexual harassment scandal. *Women’s Studies International Forum*, 88(August), 102515. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2021.102515>
- [17] Pranata, gerin rio. (2022). Analisis Wacana Kritis Model Teun. a. Van Dijk Dalam Lirik Lagu Preamble the Brandals. *Repository Universitas Islam Riau*, 113. <https://repository.uir.ac.id/13871/1/189110239.pdf>
- [18] Setiawan, F., Dwi Achmad Prasetya, A., & Putra, S. (2022). Analisis Wacana Kritis Model Teun Van Dijk Pada Pemberitaan Kasus Pencabulan Santri Oleh Anak Kiai Jombang Dalam Media Online. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 8(2), 224–237. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/kembara>
- [19] Umam, H. (2009). Analisis Wacana Teun A. Van Dijk Terhadap Skenario Film “Perempuan Punya Cerita.” *Skripsi*, 135.
- [20] Van Dijk, T. A. . (2000). New(s) Racism: a Discourse Analytical Approach. *Ethnic Minorities and the Media*, 35–49.
- [21] YOUTUBE, D. I. (2023). ANALISIS WACANA VAN DIJK TERHADAP DAKWAH DIGITAL PONDOK PESANTREN AL-BIDAYAH. [http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/24646%0Ahttp://digilib.uinkhas.ac.id/24646/1/Mohammad Irchamul Huda WATERMARK.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/24646%0Ahttp://digilib.uinkhas.ac.id/24646/1/Mohammad%20Irchamul%20Huda%20WATERMARK.pdf)